

**PERANAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
PENGEMBANGAN ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH SEBAGAI
PENDIDIKAN POLITIK DI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
NEGERI SE-KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh: Bayu Dwi Saputro dan Dr. Nasiwan, M.Si./Program Studi Pendidikan
Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Yogyakarta

bayuhazard95@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) peranan guru PKn dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, 2) kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode fenomenologi. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara *purposive* dan diperoleh dua subjek penelitian, yaitu Guru PKn dan Ketua OSIS di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check*. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis induktif melalui langkah-langkah reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa: *Pertama*, guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih sudah melaksanakan pendidikan politik pada saat pembelajaran di kelas dengan berbagai macam metode pembelajaran. Sedangkan peranan guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik masih belum dilaksanakan karena banyak kendala yang dihadapinya. *Kedua*, kendala-kendala yang dihadapi guru PKn dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik adalah sebagian guru PKn belum memahami konsep pendidikan politik, sulitnya menanamkan nilai-nilai politik kepada siswa, sulitnya membangun keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, kurangnya koordinasi antar guru di sekolah untuk mengembangkan OSIS sebagai pendidikan politik, kurangnya kehadiran guru PKn di sekolah masing-masing, kurangnya partisipasi guru PKn dalam kegiatan-kegiatan OSIS dan kurangnya pembinaan mengenai pendidikan politik terhadap pengurus OSIS.

Kata kunci: Peranan Guru PKn, Pengembangan OSIS, Pendidikan Politik.

ROLE OF CIVIC EDUCATION TEACHERS IN THE DEVELOPMENT OF
STUDENT COUNCIL AS A POLITICAL EDUCATION IN THE JUNIOR
HIGH SCHOOL OF PENGASIH DISTRICT, KULON PROGO REGENCY

By: Bayu Dwi Saputro and Dr. Nasiwan, M.Si./ Civics Education Study Program,
Faculty of Social Sciences,
State University of Yogyakarta

bayuhazard95@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to describe: 1) the role of civics teachers in the development of student council as a political education in all Junior High Schools of Pengasih District, Kulon Progo Regency, 2) constraints which are faced by civics teachers in the development of student council as a political education in Junior High School of Pengasih District, Kulon Progo Regency.

This research is a descriptive study and employed qualitative approach through phenomenological method. Researcher used purposive way in determining research subject and obtained two research subjects that are the civics teachers and student union chiefs in Junior High School of Pengasih District. Data collection techniques which were used are interview and documentation. Researcher used cross check technique to check the validity of the data. A data analysis technique that was employed in this study is inductive analysis through the steps of data reduction, categorization, presentation and drawing conclusions.

The results of this study showed that: Firstly, civics teachers in all Junior High Schools of Pengasih District, Kulon Progo Regency have performed political education development in the teaching-learning process of civics in the classroom with a variety of teaching methods. Otherwise, the role of civics teachers in all Junior High Schools of Pengasih District in developing student union as a political education has not been done because of many constraints they faced. Secondly, the constraints of civics teacher in developing student union as a political education are that some civics teachers have not understood concept of political education, the difficulty to the values of politics to the students, the difficulty to build the courage of expressing arguments, the lack of coordination among the teachers in the school to develop student council as a political education, the lack of civics teacher attendances in each school, the lack of participation of civics teachers in student council activities and the lack of guidance on political education of the student council.

Keywords: roles of civics teacher, student council development, political education.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik penting untuk diberikan dan dibudayakan pada setiap individu, khususnya pada siswa di sekolah. Pendidikan politik semestinya ditanamkan secara esensial bukan hanya formalitas, siswa didorong untuk memahami materi politik secara holistik dan mendalam. Sekaligus disajikan dengan mencakup semua ranah, baik aspek afektif maupun psikomotorik, bukan hanya aspek kognitif. Hal tersebut penting untuk menanamkan nilai-nilai dan membentuk sikap politik siswa.

Melalui pendidikan politik, diharapkan warga negara dapat mewujudkan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat, serta kebebasan berserikat untuk menumbuhkan kehidupan politik yang demokratis sesuai yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28 disebutkan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang. Undang Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menjelaskan bahwa “pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara”.

Pendidikan politik di Indonesia masih belum berhasil membentuk sistem nilai politik sesuai nilai-nilai yang termuat dalam Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945. Sehingga keinginan untuk membentuk *good citizenship* masih sebatas keinginan dan belum terealisasi dengan nyata. Pengalaman buruk masyarakat selama orde baru yang menggunakan sistem indoktrinasi politik dalam bentuk Pendidikan Moral Pancasila dan penataran P4 menjadikan masyarakat merasakan kekecewaan terhadap pemerintah karena indoktrinasi politik yang dilakukannya. Selama lebih dari 30 tahun masyarakat mengapresiasikannya sikap antipati dan sinisme dengan segala hal yang berbau Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945, termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan pada Pasal 37 Undang Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat penting dalam membentuk warganegara yang cerdas dan warganegara yang baik (*smart and good citizen*). Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memusatkan perhatian pada pengembangan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*) dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, dan sosial; baik secara individu, sosial, maupun sebagai pemimpin hari ini dan esok. Pendidikan Kewarganegaraan juga memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosial kultur, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan bentuk pengajaran politik atau pendidikan politik. Sebagai pendidikan politik berarti fokusnya lebih menekankan bagaimana membina warga negara yang lebih baik (memiliki kesadaran politik dan hukum) lewat suatu proses ini karakter ilmu politik sangat berpengaruh secara dominan baik dalam mengembangkan materi maupun strategi pengajarannya (Cholisin, 2000:1.9). Dalam belajar politik dengan metode pendidikan politik bersifat dialogis, terbuka, rasional atau penyadaran. Di sekolah, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) arahnya yaitu menumbuhkan “*Good Citizenship*” atau agar anak menjadi efektif bagi bangsanya. Anak banyak belajar pengetahuan, nilai, sikap, dan perilaku politik secara eksplisit, terutama melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang efektif adalah suatu keharusan karena kemampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat demokratis, berfikir secara kritis dan bertindak secara sadar dalam dunia yang plural, memerlukan empati yang memungkinkan kita

mendengar dan karenanya mengakomodasi pihak lain, semuanya itu memerlukan kemampuan yang memadai. Lebih lanjut dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) harus menyentuh persoalan-persoalan utama dalam kehidupan politik. Untuk menumbuhkan dan atau meningkatkan kesadaran politik yang otonom dari setiap warga negara, maka pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan benar mutlak diperlukan. Pelaksanaan pendidikan politik ini tidak hanya dilaksanakan melalui lembaga non-formal oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil seperti partai politik, bisa juga dilaksanakan oleh pemerintah melalui pendidikan formal di sekolah. Pelaksanaan pendidikan politik di sekolah dapat dilakukan dengan cara melaksanakan pembinaan kesiswaan.

Sekolah perlu dan wajib menyelenggarakan pembinaan kesiswaan dengan memberi bekal dan kemampuan kepada siswa untuk mengembangkan potensi siswa melalui organisasi ekstrakurikuler di sekolah selain melalui pembelajaran di dalam kelas. Salah satu organisasi ekstrakurikuler resmi di sekolah yaitu Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). OSIS berfungsi sebagai wadah siswa berorganisasi dan menampung seluruh kegiatan siswa. Hal ini sesuai dengan apa yang tercantum pada Permendiknas nomor 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan tepatnya pada bab III pasal 1 yakni “organisasi kesiswaan di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah”. Organisasi ini bertujuan mengajarkan kepada siswa untuk lebih bersifat demokratis, bertanggung jawab, serta menghargai sehingga ini diharapkan dapat berguna sebagai bekal siswa yang nantinya akan terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di dalam suatu organisasi, siswa akan belajar berdemokrasi secara langsung walaupun dalam lingkup yang masih terbatas. Penanaman konsep politik pada usia Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat penting agar mereka tidak mendapat konsep yang salah dan keliru tentang politik. Pentingnya pendidikan politik pada masa remaja sangat menentukan tingginya tingkat kesadaran politik seseorang. Semakin awal seorang individu mendapat pembelajaran

tentang politik maka semakin tinggi kesadarannya untuk mau berpartisipasi langsung dan mampu mengemban tanggung jawab sebagai warga negara yang baik.

Keberhasilan dari implementasi pendidikan politik pada OSIS tentunya tidak terlepas dari peranan guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan aktor sosialisasi politik di sekolah yang berkewajiban untuk memberikan pendidikan politik yang rasional, cerdas, dan santun kepada siswa. Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pendidik politik harus menentukan berbagai pengetahuan yang sesuai bagi siswa. Berbagai macam keahlian tentang pendidikan politik diperlukan untuk diberikan sebagai pegangan jika siswa diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara sukses dalam politik. Politik bukan hanya menyangkut tentang ketentuan saja, tetapi juga menyangkut tentang nilai-nilai, bukan hanya dalam meraih beberapa tujuan nilai tertentu tapi juga dalam meraihnya dengan cara menghormati martabat manusia.

Pada kenyataannya OSIS sebagai wahana pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih kurang dimanfaatkan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dalam rangka membangun dan mengembangkan *civic participation* pada tingkat sederhana dengan menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dan juga pengalaman nyata melalui kegiatan-kegiatan OSIS sehingga siswa memiliki pengetahuan dan kemauan melaksanakan nilai-nilai politik. Pemanfaatan OSIS di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih hanya dilakukan oleh pembina OSIS sebagai orang yang bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan. Pembinaan disini juga masih kurang maksimal karena hanya sebatas mengembangkan minat dan bakat siswa saja melalui kegiatan-kegiatan OSIS. Sedangkan penanaman nilai-nilai politik kepada siswa agar terwujudnya warga negara yang melek politik, melek hukum, melek permasalahan diri, masyarakat, bangsa dan negara masih kurang terlihat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, karena menggambarkan keadaan suatu subjek, yakni peranan guru PKn dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena menguraikan dalam bentuk kata-kata tentang perilaku guru PKn dalam menjalankan peranannya mengembangkan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah fenomenologi, karena mengungkap suatu fenomena yang empirik terkait kehidupan sehari-hari guru PKn dalam menjalankan peranannya melaksanakan pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih.

Penentuan subjek penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *purposive*, dengan pertimbangan narasumber tersebut merupakan orang yang mempunyai kewenangan dan terlibat langsung dalam melaksanakan peranannya dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih. Berdasarkan kriteria tersebut ditemukan subjek penelitian yaitu Guru Pendidikan Kewarganegaraan dan Ketua OSIS.

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan 12 Januari 2016. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian melalui teknik wawancara dan dokumentasi.

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross check*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah teknik analisis induktif melalui langkah-langkah reduksi data, kategorisasi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Guru PKn dalam Pengembangan OSIS sebagai Pendidikan Politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih

Penguasaan guru terhadap materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*) yang mampu mengembangkan karakter bangsa (*nation and character building*), pemberdayaan warganegara (*citizen empowerment*) dan masyarakat kewarganegaraan (*civil society*) (Cholisin, 2006: 13). Tujuan tersebut akan terwujud apabila didukung oleh guru yang menguasai materi pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan secara mendalam, dan mampu mengaktifkannya dengan kehidupan yang dialami oleh siswa. Selain penguasaan guru terhadap materi pelajaran, tercapainya tujuan pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga sangat dipengaruhi oleh penguasaan guru terhadap pembelajaran.

Guru memiliki peranan yang sentral, baik sebagai perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluator pembelajaran. Hal ini berarti bahwa kemampuan guru dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas sangat bergantung pada kemampuan guru, terutama dalam memberikan kemudahan belajar kepada siswa secara efektif (E. Mulyasa, 2011: 37). Dalam prakteknya para guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih sudah memberikan kemudahan belajar kepada siswa melalui pengetahuan tentang pendidikan politik kepada siswa dalam pembelajaran di kelas. Guru PKn mengajarkan materi tentang pendidikan politik di kelas dengan berbagai macam metode, seperti: diskusi, pemberian materi dengan contoh, penugasan pengamatan langsung, dll. Metode yang diberikan oleh guru PKn diharapkan dapat mempermudah siswa dalam memahami materi tentang pendidikan politik agar bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari.

Selain dalam hal pembelajaran di kelas, guru juga mempunyai peranan dalam membina siswa menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam rangka membangun

bangsa. Pembinaan siswa dapat dilakukan dengan cara mengembangkan pendidikan politik. Pendidikan politik sangat erat kaitannya dengan PKn, seperti pendapat dari (Cholisin, 2004: 10) yang menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) diartikan sebagai pendidikan politik yang fokus materinya peran warga negara dalam kehidupan bernegara yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peran tersebut yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk menunjukkan upaya-upaya yang mengarah pada pembinaan warga negara ke arah yang lebih baik (*how a good citizen*).

Dalam menjalankan pembinaan warga negara, sekolah merupakan salah satu agen pendidikan politik karena di sekolah siswa melaksanakan pendidikan formal. Menurut Efriza (2012:33), pendidikan telah dipandang sebagai satu variabel penting dalam kegiatan menjelaskan tingkah laku politik; dan terdapat banyak pembuktian tidak langsung yang menyatakan pendidikan itu penting sebagai agen sosialisasi politik. Hal ini dapat dipahami karena di sekolah anak-anak dididik di dalam suatu proses yang sangat teratur, sistematis, dan nilai-nilai politik bisa diturunkan secara langsung ataupun tidak langsung oleh guru-guru kepada anak didik. Penanaman nilai nilai politik secara langsung dapat dilaksanakan melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, sementara penanaman nilai nilai politik tidak langsung dapat dilakukan melalui aktivitas-aktivitas non politik di sekolah yang dipandang sebagai praktek/ magang untuk aktivitas politik. Contohnya, organisasi pembentuk pribadi seperti Pramuka, Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), dan lain lain adalah bentuk yang penting dalam pembelajaran politik.

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan pembinaan kesiswaan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa secara optimal agar kepribadian siswa yang baik dapat terwujud sehingga terhindar dari pengaruh negatif sehingga siswa siap untuk menjadi warga negara yang baik. Selain itu

OSIS juga bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sekolah sehingga tidak mudah terkena pengaruh negatif yang bertentangan dengan tujuan pendidikan terutama dalam hal pendidikan politik seperti dalam salinan lampiran Permendiknas nomor 39 Tahun 2008 tentang materi pembinaan kesiswaan bahwa pembinaan pendidikan politik merupakan salah satu materi dalam pembinaan kesiswaan. Pembinaan pendidikan politik diterapkan melalui OSIS antara lain:

- a. Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing;
- b. Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa;
- c. Melaksanakan kegiatan dengan prinsip kejujuran, transparan, dan profesional;
- d. Melaksanakan kewajiban dan hak diri dan orang lain dalam pergaulan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato;
- f. Melaksanakan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan.

Berjalannya pendidikan politik melalui OSIS akan sangat tergantung dari peranan guru yang kompeten dalam bidangnya. Dalam peta konsep PKn secara utuh, dapat dilihat hubungan warga negara dan negara dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dengan sistem Demokrasi Pancasila dapat dilihat sebagai sistem nilai, pemerintah dan perilaku bernegara dengan berlandaskan pada UUD 1945 dan Pancasila dengan membangun dan mengembangkan *civic intelligence*, *civic responsibility* dan *civic participation* pada tingkat lokal, nasional dan global sehingga membentuk warga negara yang baik dan akan mendukung terwujudnya masyarakat madani Indonesia.

Civic intellegence dapat ditanamkan guru PKn SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku guru kepada peserta didik mengenai nilai-nilai politik. *Civic responsibility* dapat dikembangkan dengan melaksanakan pembelajaran atau

menciptakan iklim kelas yang longgar dan terbuka. Sedangkan *civic participation* dapat dilihat dari pembelajaran yang dilakukan dengan menjadikan siswa sebagai subjek pembelajaran dan juga pengalaman nyata melalui kegiatan-kegiatan OSIS, sehingga siswa memiliki pengetahuan dan kemauan melaksanakan nilai-nilai politik.

Peranan dari guru PKn sangat diperlukan terlebih sebagian besar guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih secara konseptual sudah memahami bahwa PKn sebagai pendidikan politik dapat dikembangkan dalam OSIS. Selain itu sebagian guru PKn juga mempunyai tanggung jawab untuk membina OSIS sesuai dengan SK tentang Pengurus OSIS dan Pembina OSIS di masing-masing sekolah. Melalui PKn generasi muda dibantu untuk memahami cita-cita nasional, hal-hal yang baik diakui oleh umum, proses pemerintahan sendiri, dan dibantu untuk memahami arti kemerdekaan untuk mereka dan untuk semua manusia, individu, dan kelompok dalam bidang kepercayaan, perdagangan, pemilu atau dalam tingkah laku sehari-hari. Mereka juga dibantu untuk memahami bermacam-macam hak kemerdekaan warga negara yang dijamin dalam konstitusi dan peraturan-peraturan lainnya dan tanggungjawab atas apa yang telah dicapainya.

Peranan guru PKn dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih ditemukan data bahwa guru PKn cenderung belum melaksanakan peranannya karena hanya sebatas mengarahkan dan memotivasi siswa agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan OSIS. Dikatakan telah melakukan pengembangan OSIS apabila para guru PKn sudah melaksanakan pembinaan OSIS secara sistematis dan bertahap untuk mewujudkan OSIS sebagai media penanaman nilai-nilai politik di sekolah. Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, pengembangan, dan pemberian berbagai bentuk bantuan yang dilakukan oleh guru PKn. Tujuan pembinaan tersebut adalah untuk meningkatkan peranan serta dan inisiatif para siswa untuk menjaga dan membina sekolah

sebagai wiyatamandala sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, menumbuhkan daya tangkal pada diri siswa terhadap pengaruh negatif yang datang dari luar maupun dari dalam lingkungan sekolah, meningkatkan apresiasi dan penghayatan seni, menumbuhkan sikap berbangsa dan bernegara, meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat serta nilai-nilai para pendiri negara, serta meningkatkan kesegaran jasmani dan rohani.

Guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih belum melaksanakan pembinaan OSIS dengan alasan bahwa beberapa guru PKn bukan sebagai pembina OSIS. Sementara guru PKn yang menjadi pembina OSIS seperti Bapak Muhayadi sebagai pembina sie Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dan Ibu Heni Sulistyawati sebagai pembina sie Bela Negara dari SMP Negeri 2 Pengasih, serta Ibu Bintari sebagai pembina bendahara OSIS dari SMP Negeri 4 Pengasih juga belum melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik. Pembinaan OSIS di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih lebih banyak dilakukan oleh ketua pembina OSIS dalam hal ini Wakil Kepala Bidang Kesiswaan.

Hal ini didukung dengan hasil temuan data di lapangan dengan beberapa narasumber yang menjadi ketua OSIS periode 2014/2015 di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih bahwa guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih tidak pernah ikut campur dalam kegiatan OSIS. Di SMP Negeri 1 Pengasih kegiatan-kegiatan OSIS direncanakan oleh pengurus OSIS dan kemudian dikonsultasikan kepada ketua pembina OSIS saja. Sedangkan di SMP Negeri 2 Pengasih, SMP Negeri 3 Pengasih, dan SMP Negeri 4 Pengasih kegiatan-kegiatan OSIS direncanakan oleh ketua pembina OSIS dan kemudian disosialisasikan kepada pengurus OSIS untuk ditindaklanjuti.

2. Kendala Guru PKn dalam Pengembangan OSIS sebagai Pendidikan Politik di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih

Dalam menjalankan peranannya tidaklah mudah bagi guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih karena masih ada banyak kendala yang dialaminya. Dari hasil temuan di lapangan, kendala yang dihadapi guru PKn yaitu:

- a. Sebagian guru PKn belum memahami konsep pendidikan politik.
- b. Sulitnya menanamkan nilai-nilai politik kepada siswa agar siswa memiliki kesadaran politik yang bertanggungjawab.
- c. Sulitnya membangun keberanian siswa menyampaikan pendapat terkait dengan hak dan kewajiban.
- d. Kurangnya koordinasi antar guru di lingkungan sekolah dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik.
- e. Kurangnya kehadiran guru PKn di sekolah masing-masing.
- f. Kurangnya partisipasi atau keterlibatan langsung guru PKn dalam kegiatan-kegiatan OSIS.
- g. Kurangnya pembinaan mengenai pendidikan politik terhadap siswa dan pengurus OSIS oleh guru PKn.

PENUTUP

Simpulan

Pertama, dalam melaksanakan peranannya sebagai pengembang pendidikan politik, guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih hanya melakukannya pada saat pembelajaran PKn di kelas dengan berbagai macam metode pembelajaran. Sedangkan peranan guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik masih belum dilaksanakannya. Guru PKn hanya sebatas memberikan pengarahan dan motivasi kepada siswa agar terlibat dalam kegiatan-kegiatan

OSIS. Sementara dalam pelaksanaan pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik tidak cukup hanya memberikan pengarahan dan motivasi saja. Guru PKn harus melakukan pembinaan OSIS secara sistematis dan bertahap untuk menumbuhkan warganegara yang paham tentang nilai-nilai politik agar dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, Dalam pengembangan OSIS sebagai pendidikan politik, guru PKn di SMP Negeri se-Kecamatan Pengasih mengalami banyak kendala yang mengakibatkan guru PKn belum mampu mengembangkan OSIS sebagai pendidikan politik. Kendala tersebut yaitu: sebagian guru PKn belum memahami konsep pendidikan politik, sulitnya menanamkan nilai-nilai politik kepada siswa, sulitnya membangun keberanian siswa dalam menyampaikan pendapat, kurangnya koordinasi antar guru di sekolah untuk mengembangkan OSIS sebagai pendidikan politik, kurangnya kehadiran guru PKn di sekolah masing-masing, kurangnya partisipasi guru PKn dalam kegiatan-kegiatan OSIS dan kurangnya pembinaan mengenai pendidikan politik terhadap pengurus OSIS.

Saran

1. Bagi guru

- a. Guru hendaknya lebih mengembangkan diri serta meningkatkan pengetahuannya mengenai pendidikan politik yang terdapat dalam mata pelajaran PKn.
- b. Dalam mengembangkan pembelajaran PKn, guru tidak hanya terpaku pada teori tetapi perlu juga melakukan perkembangan praktik. Salah satu media yang sesuai untuk mengaplikasikan teori adalah OSIS. Oleh sebab itu guru agar berkenan memanfaatkan keberadaan OSIS sebagai media belajar politik dan melakukan pembinaan kepada pengurus OSIS.
- c. Guru agar berkenan bersikap terbuka pada setiap saran dan melakukan interaksi yang baik dengan sesama komunitas profesi.

2. Bagi Sekolah

- a. Sekolah seharusnya merancang OSIS agar lebih berkembang ke arah pendidikan politik untuk mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin-pemimpin bangsa.
- b. Sekolah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan OSIS terutama dalam rangka menerapkan pendidikan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Cholisin. 2000. *Diktat Ilmu Kewarganegaraan dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 9 Modul. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

_____. 2004. *Diktat Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

_____. 2006. *Seminar Nasional Evaluasi Pelaksanaan KBK dalam Menyongsong Undang-Undang Guru dan Dosen di Propinsi Gorontalo*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

E Mulyasa. 2011. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Bandung: Rosdakarya.

Efriza. 2012. *Political Explore Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta.

Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 tentang Warga Negara dan Penduduk.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.